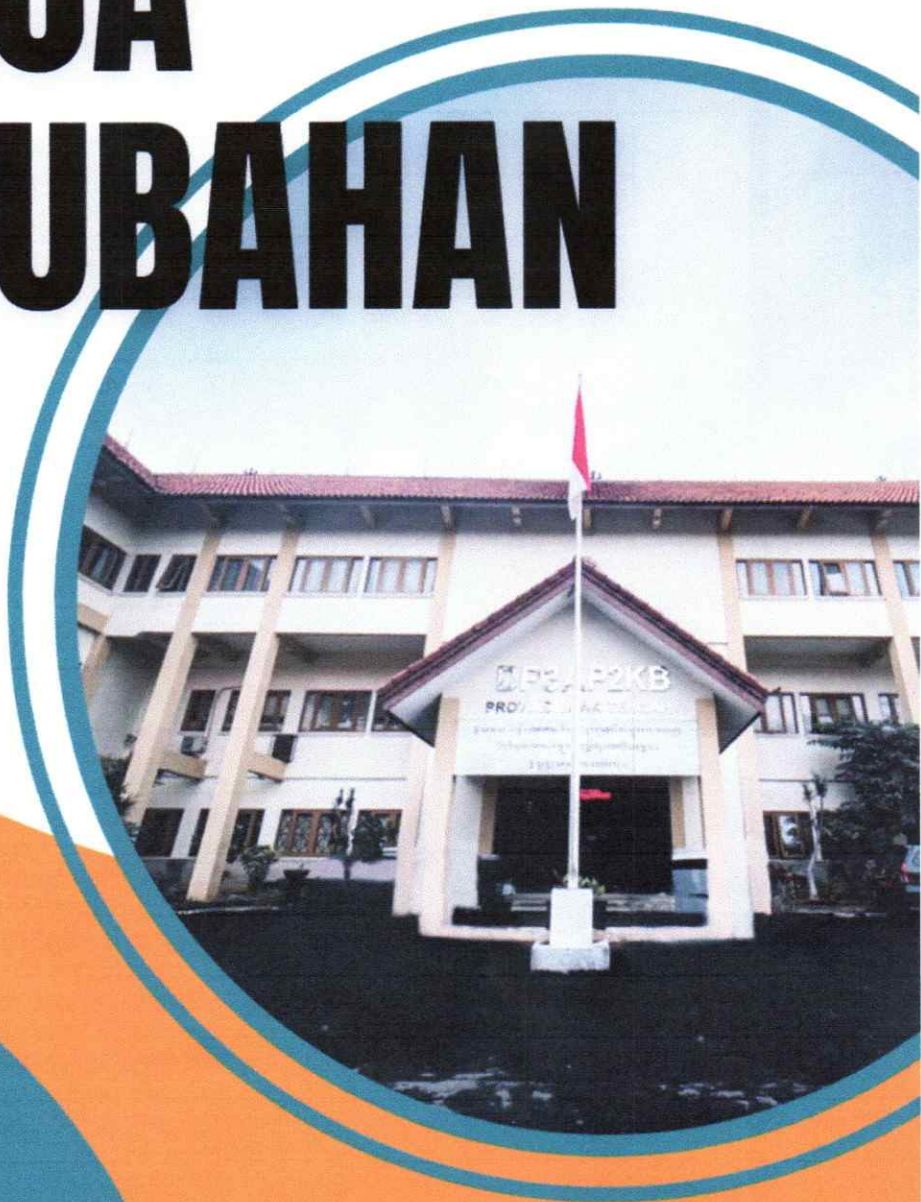




Dinas Perempuan dan Anak  
Provinsi Jawa Tengah



# 2024 RENCANA KERJA PERUBAHAN



DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024.

Semarang, September 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Dra. RETNO SUDHWI, Apt, M.Si, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja Perubahan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan evaluasi yang pada semester I Tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program serta kegiatan yang inovatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja Perubahan disusun secara berdasarkan evaluasi kinerja pada triwulan II serta melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 ini merupakan langkah perbaikan penyusunan program kegiatan yang sudah dan akan berjalan. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh multi pihak dan sektor, sehingga Renja perubahan ini dapat selesai. Renja perubahan ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Kedepan, hal yang harus segera kami lakukan adalah optimalisasi kinerja program berdasarkan anggaran yang sudah ada, sehingga target capaian Renja Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681124 199310 2 001<sup>v</sup>

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II   HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	9
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	23
<b>BAB IV   PENUTUP.....</b>	65

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan .....	2
-----	-------------------------------------------------------------------	---

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah.....	10
3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024.....	21
3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

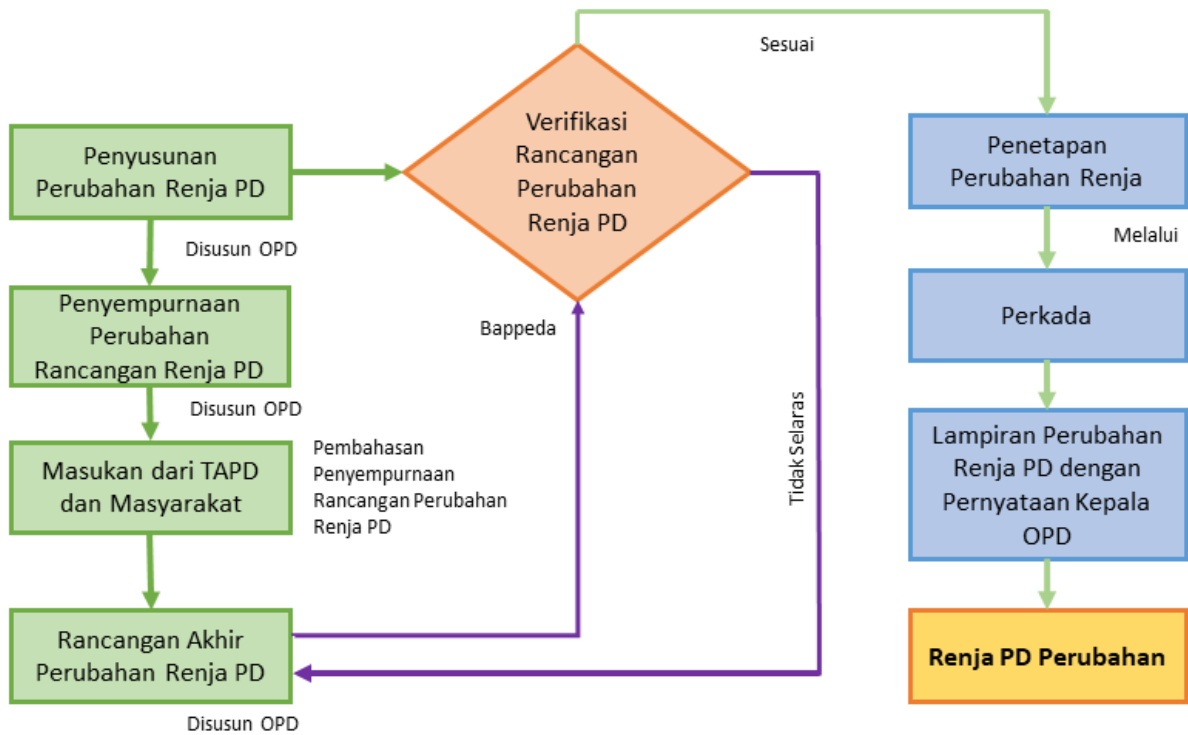
### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan RKPD Tahun 2024 harus menjadi dasar dan pedoman seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran dari dokumen perubahan RKPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan perubahan Renja PD perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar target tahunan dapat dicapai. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran diperlukan agar dapat lebih optimal sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah jangka waktu 1 (satu) tahun memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Penyesuaian Program Prioritas daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang mendasarkan pada usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder.

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Desk usulan perubahan Rancangan Renja baik pagu maupun pentargetan, penyempurnaan perubahan Rancangan Renja baik pagu maupun pentargetan, Evaluasi hasil capaian kinerja triwulan II dan Penetapan target indikator dan anggaran perubahan Renja Perangkat Daerah, serta penyusunan rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

## Bagan 1. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah



Rancangan perubahan dalam RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, target indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan Renja RKPD yang harus sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan perubahan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta hasil evaluasi triwulan II berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 murni yang dituangkan di dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (16-286/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
  27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
  28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

- Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
  33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
  35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
  36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026;
  37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

39. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050.23/0001443 tanggal 13 Februari 2024 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
40. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0005491 tanggal 19 Juli 2024 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
41. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.7/435 Tahun 2024 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah memberikan arah optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Tolak ukur kinerja internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun dengan dokumen di atasnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah:

**BAB I      Pendahuluan**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II      Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 serta perkiraan capaian akhir tahun Renja, Pencapaian target Renja dan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada triwulan II yang telah memenuhi target, melebihi target, maupun yang belum memenuhi target, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah (faktor-faktor penyebabnya), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, implikasi yang timbul terhadap capaian program, serta kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil.

**BAB III     Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang indikator Tujuan dan sasaran perubahan Renja PD, rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah, serta lokasi sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif perubahan tahun 2024.

**BAB IV     Penutup**

Berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan kinerja. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Capaian Kinerja Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024  
Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
	<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	-	7,90		-	-	-	-
		Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	70			60	60	100	60
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%	-	42,85		-	-	-	-
		Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	15	-		10	2	20	10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%	-	30		-	-	-	-
		Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	80	-		70	68,40	97,71	70
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>Per 100.000</b>	-	<b>4,64</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring</b>	%	-	<b>20</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar</b>	%	<b>50</b>	-		<b>11</b>	<b>28,57</b>	<b>259,73</b>	<b>28,57</b>
		<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	%	<b>100</b>	-		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	-	31,42		-	-	-	-
		Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	58	-		43	31,42	73,07	43
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	-	100		-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100			100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	14	10		10	4	40	10
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender</b>	%	-	<b>63,88</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak</b>	%	-	<b>63,88</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar</b>	%	<b>25,71</b>			<b>14,29</b>	<b>22,86</b>	<b>159,97</b>	<b>22,86</b>
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%	-	63,88		-	-	-	-
		Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	-		100	100	100	100
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%	-	63,88		-	-	-	-
		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan	%	100	-		100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Konseling yang responsif gender dan anak								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi</b>	%	-	<b>20</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak</b>	%	<b>35</b>	-		<b>25</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>25</b>
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kab/Kota	-	7					
		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	15	-		9	5,71	63,44	9
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama</b>	%	-	<b>100</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)</b>	%	-	<b>25</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya</b>	%	<b>88,57</b>	-		<b>82,85</b>	<b>82,85</b>	<b>100</b>	<b>82,85</b>
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kab/kota	-	35		-	-	-	-
		Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4			0	0	0	4
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	15		20	0	0	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap anak</b>	<b>Per 100.000</b>	<b>11,7</b>	<b>10,33</b>		<b>11,50</b>	<b>4,08</b>	<b>281,86</b>	<b>11,50</b>
		<b>Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejing</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>15</b>	<b>20</b>	<b>133,33</b>	<b>20</b>
		<b>Persentase korban kekerasan anak terlayani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	-	25,70		-	-	-	-
		Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	37,14	-		31,40	25,70	81,85	31,40
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	-	100		-	-	-	-
		Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	-	-	10		-	-	-	-
		Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	-		100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	-	15		-	-	-	-
		Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	-		15	10	66,67	15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang</b>	%	-	<b>61,11</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)</b>	%	-	<b>35</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan</b>	%	<b>62</b>			<b>61,11</b>	<b>66,67</b>	<b>109,10</b>	<b>66,67</b>
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kab/Kota	-	22		-	-	-	-
		Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kab/Kota	22			18	24	133,33	24
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	16		1	1	100	1
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</b>	%	-	<b>30,38</b>		-	-	-	-
		<b>Unmeetneed KB</b>	%	<b>9,8</b>	<b>8,6</b>		<b>10</b>	<b>9,66</b>	<b>103,52</b>	<b>10</b>
		<b>Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)</b>	%	<b>66,4</b>			<b>65,58</b>	<b>64,75</b>	<b>98,73</b>	<b>65,58</b>
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan	Jumlah peserta KB Aktif	Orang	-	4.651.697		-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
		Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31,5			27	27	88,52	30,50
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%	-	57,88		-	-	-	-
		Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	20			10	0	0	10
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan</b>	%	-	<b>92,07</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan</b>	%	-	<b>96,60</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota</b>	%	-			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>30</b>
		<b>Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan</b>	%	<b>36</b>			<b>28</b>	<b>27,36</b>	<b>97,71</b>	<b>28</b>
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	Kelompok	-	21.540		-	-	-	-
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	18,5			19	17,30*	109,83	19
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	-	7.023					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
		Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	-	35		-	-	-	-
		Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30			30	15	50	30
	<b>Non Urusan</b>									
	<b>Eks BAU</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah</b>	%	-	<b>90</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD</b>	%	-	<b>100</b>		-	-	-	-
		<b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah</b>	%	<b>90</b>			<b>90</b>	<b>35</b>	<b>38,89</b>	<b>90</b>
		<b>Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah</b>	%	<b>70</b>			<b>45</b>	<b>20</b>	<b>44,44</b>	<b>45</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak</b>	%	<b>35</b>			<b>25</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>25</b>
		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	15			9	5,71	63,44	<b>9</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	-	2		-	-	-	-
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	60			40	20	50	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	-	1		-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3			1	0	0	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	2		-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3			1	0	0	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	1		-	-	-	-
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90			90	35	38.89	90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	-	1		-	-	-	-
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90			90	35	38.89	90
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	2		-	-	-	-
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15			5	2	40	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	1		-	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3			1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	1		-	-	-	-
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12			4	2	50	4

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 yang telah dirubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah antara lain :

Mendasarkan isu-isu strategis pada penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja perubahan dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. Mendorong peningkatan pembangunan Keluarga Berkualitas;
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Guna mendukung pencapaian tujuan Perubahan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang terutama pada bidang ekonomi dan politik;
2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan secara optimal dan komprehensif;
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
5. Terkendalinya jumlah penduduk;
6. Meningkatnya kualitas penduduk dan Pembangunan keluarga;

7. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024	
					Renja PD	Perubahan Renja PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan		Pengeluaran Perempuan perKapita	Ribu rupiah	10.100	10.100
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Yang dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	40	40
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Per 100.000	5,4	5,4
		Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.25	4.25
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66	66
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	70	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024	
					Renja PD	Perubahan Renja PD
		Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	75	75
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas		Persentase Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2	2
		Terkendalinya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13	2,13
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	100	100
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73,5	73,5
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,75	2,75
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,90	87,90

### **3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 antara lain :

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan Ekonomi sebesar 60%.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart sebesar 11% dan Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar sebesar 14,29%.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov) sebesar 25%.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya sebesar 82,85%.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio korban kekerasan terhadap anak sebesar 11,5% dan Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif sebesar 100%.

**g. Program Pengendalian Penduduk**

Kegiatan diarahkan pada Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan sebesar 61,11%.

**h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase mCPR sebesar 65,58%; Unmeetneed KB sebesar 10%.

**i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan sebesar 28%.

**j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah sebesar 90%; Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah sebesar 45%.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 22.396.625.000,-; dengan rincian pagu indikatif pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 3.287.844.000,-; pagu indikatif pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 1.425.000.000,-; pagu indikatif pada urusan Penunjang Pemerintah daerah sebesar Rp 16.525.539.000,- dan pagu indikatif pada UPTD PPPA sebesar Rp. 1.158.242.000,-.

Tabel 3.2.

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan					Pengeluaran perempuan per kapita	Per 100.000	10.100	10.100	10.100						
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan				Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	40	40						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	%	60	60	60	1.375.000.000	1.375.000.000	1.501.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	10	10	180.465.000	180.465.000	229.700.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KGPP</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	4	4	3	48.430.000	48.430.000	47.330.000			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	80	80	80	82.640.000	82.640.000	62.840.000			
				Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	55	55	55	49.395.000	49.395.000	119.530.000			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,		Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	%	70	70	70	1.194.535.000	1.194.535.000	1.271.300.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KGPP</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya										
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	290	290	1.106	1.149.535.000	1.149.535.000	1.198.300.000			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum,	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di	Kelompok	6	6	6	45.000.000	45.000.000	73.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi										
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar</b>	%	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>			
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KGPP</b>
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan	OPD	10	10	10	100.000.000	100.000.000	100.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Lintas Kabupaten/Kota										
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>			<b>Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov)</b>	%	25	25		229.800.000	229.800.000	229.800.000			
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	9	9	9	229.800.000	229.800.000	229.800.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>SEKRETARIAT</b>
				Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	6	6	229.800.000	229.800.000	229.800.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart</b>	%	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>858.350.000</b>	<b>858.350.000</b>	<b>946.094.000</b>			
					<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>194.608.000</b>	<b>194.608.000</b>	<b>194.608.000</b>			
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan	%	43	43	43	125.750.000	125.750.000	125.750.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KGPP</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	50.750.000	50.750.000	50.750.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	2	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	194.608.000	194.608.000	194.608.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>UPTD PPA</b>
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang	Orang	95	95	95	76.868.000	76.868.000	76.868.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat										
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	5	117.740.000	117.740.000	117.740.000			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	10	10	10	732.600.000	732.600.000	820.344.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KGPP</b>
				Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan	Dokumen	3	3	3	50.000.000	50.000.000	50.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	10	10	100.000.000	100.000.000	103.000.000			
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan	Orang	100	100	70	30.000.000	30.000.000	30.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kewenangan Provinsi	Kebutuhan Spesifik										
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	552.600.000	552.600.000	587.344.000			
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			<b>Persentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya</b>	%	<b>82,85</b>	<b>82,85</b>	<b>82,85</b>	<b>290.000.000</b>	<b>290.000.000</b>	<b>318.448.000</b>			
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4	4	4	240.000.000	240.000.000	268.448.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG PHPA</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	90.000.000	90.000.000	90.000.000			
				Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	20	20	20	150.000.000	150.000.000	178.448.000			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	20	20	50.000.000	50.000.000	50.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG PHPA</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kewenangan Provinsi												
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	1	1	33.000.000	33.000.000	33.000.000			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	1	1	17.000.000	17.000.000	17.000.000			
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar</b>	%	14.29	14.29	14.29	150.000.000	150.000.000	121.552.000			<b>BIDANG PHPA</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	150.000.000	150.000.000	121.552.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG PHPA</b>
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20	20	150.000.000	150.000.000	121.552.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>Rasio korban kekerasan terhadap anak</b>	<b>per 100.000</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>300.750.000</b>	<b>300.750.000</b>	<b>300.750.000</b>			
					<b>Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>194.608.000</b>	<b>194.608.000</b>	<b>231.438.000</b>			
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada anak	<b>%</b>	<b>31.4</b>	<b>31.4</b>		<b>166.240.000</b>	<b>166.240.000</b>	<b>166.240.000</b>	<b>OPD Provinsi;</b>	<b>OPD Provinsi ;</b>	<b>BIDANG PHPA</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50.750.000</b>	<b>50.750.000</b>	<b>50.750.000</b>			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	15	15	115.490.000	115.490.000	115.490.000			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	15	15	134.510.000	134.510.000	134.510.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG PHPA</b>	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Dokumen	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Khusus Kewenangan Provinsi										
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000			
				Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000			
				Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	150	150	150	69.510.000	69.510.000	69.510.000			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	194.608.000	194.608.000	231.438.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>UPTD PPA</b>
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan	Orang	1.100	1.100	110	76.868.000	76.868.000	113.698.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kewenangan Provinsi	layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus										
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	35	35	117.740.000	117.740.000	117.740.000			
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>												
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA</b>			<b>Persentase mCPR</b>	%	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	<b>595.000.000</b>	<b>595.000.000</b>	<b>588.000.000</b>			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>BERENCANA (KB)</b>													
					<b>Unmetneed KB</b>	%	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>			
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Pengguna Kotransepi MKJP	%	30.5	30.5	27	595.000.000	595.000.000	588.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KB DAN ADVOKASI KIE</b>
				Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai	Dokumen	40	40	40	325.000.000	325.000.000	325.000.000			<b>BIDANG KB DAN ADVOKASI KIE</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	dengan Kearifan Budaya Lokal										
				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/ Kota	18	18	18	270.000.000	270.000.000	263.000.000			<b>BIDANG KB DAN ADVOKASI KIE</b>
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	10	10	10	100.000.000	100.000.000	100.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG KB DAN ADVOKASI KIE</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok	6	6	6	100.000.000	100.000.000	100.000.000			
		<b>PROGRAM PENGEN DALIAN PENDUD UK</b>			<b>Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan</b>	%	<b>61,11</b>	<b>61,11</b>	<b>61,11</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	<b>297.000.000</b>			
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian		Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan.	kab/kota	18	18	18	300.000.000	300.000.000	292.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG DALDUK KS</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			n Kuantitas Penduduk												
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	2	2	70.000.000	70.000.000	70.000.000			
				Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	4	4	4	80.000.000	80.000.000	80.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat											
				Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/Kota	2	2	2	20.000.000	20.000.000	19.730.000			
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Dokumen	4	4	4	130.000.000	130.000.000	122.270.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Berencana (Bangga Kencana)	Berencana (Bangga Kencana)										
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG DALDUK KS</b>
				Pemetaan Program Pembangunan Keluarga,Ke pendudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
		<b>PROGRAM PEMBER DAYAAN</b>			<b>Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan</b>	%	32	32	28	440.000.000	440.000.000	440.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>													
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	19	19	19	130.000.000	130.000.000	130.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG DALDUK KS</b>
				Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	5	5	3	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas	Kabupaten/Kota	2	2	3	80.000.000	80.000.000	80.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ketahanan Keluarga dan Remaja										
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha	%	30	30	30	310.000.000	310.000.000	310.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>BIDANG DALDUK KS</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	80.000.000	80.000.000	80.000.000			
				Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja	Kelompok	3	3	3	180.000.000	180.000.000	180.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga										
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah</b>	%	90	90	90	16.129.864.000	16.129.864.000	16.760.935.000			<b>SEKRETARIAT</b>
					<b>Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah</b>	%	45	45	45	260.000.000	260.000.000	267.000.000			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%	40	40	40	260.000.000	260.000.000	267.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi;	<b>SEKRETARIAT</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perangkat Daerah		sesuai peraturan perundangan										
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	121.000.000	121.000.000	127.000.000			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1	1	139.000.000	139.000.000	140.000.000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	11.913.925.000	11.913.925.000	11.810.559.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>SEKRETARIAT</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	60	60	11.518.925.000	11.518.925.000	11.415.559.000			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1	320.000.000	320.000.000	318.200.000			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	51.800.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	112.000.000	112.000.000	117.000.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>SEKRETARIAT</b>
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	110.000.000	110.000.000	110.000.000			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1	2.000.000	2.000.000	7.000.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90	90	637.644.000	637.644.000	415.565.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>SEKRETARIAT</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	61	61	61	35.380.000	35.380.000	35.380.000			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	200.000.000	200.000.000	100.000.000			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	336.264.000	336.264.000	227.520.000			<b>UPTD PPA</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	20	20	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	25	25	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Orang	50	50	50	60.000.000	60.000.000	46.665.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Perundang-Undangan	perundang-undangan										
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100	852.000.000	852.000.000	1.326.750.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	<b>SEKRETARIAT</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	10.000.000	10.000.000	20.000.000			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	10	10	5	1.000.000	1.000.000	1.000.000			<b>UPTD PPA</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	3	5	300.000.000	300.000.000	597.000.000			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	2	6.000.000	6.000.000	35.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	100.000.000	100.000.000	134.750.000			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	5	5	10.000.000	10.000.000	15.000.000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	3	3	68.000.000	68.000.000	68.000.000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1	1	230.000.000	230.000.000	275.000.000			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1	7.000.000	7.000.000	11.000.000			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan	Dokumen	2	2	2	117.000.000	117.000.000	167.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Elektronik pada SKPD	berbasis elektronik pada perangkat daerah										
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5	5	156.695.000	156.695.000	156.195.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	SEKRETARIAT
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	5	5	150.000.000	150.000.000	149.500.000			
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	2	1	1.695.000	1.695.000	1.695.000			UPTD PPA
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	5	4	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	2.301.600.000	2.301.600.000	1.953.380.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	650.000.000	650.000.000	458.550.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000			UPTD PPA
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	8.000.000	8.000.000	12.000.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1.472.600.000	1.472.600.000	1.378.660.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	130.000.000	130.000.000	63.170.000			UPTD PPA

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	4	4	1.007.000.000	1.007.000.000	981.486.000	OPD Provinsi;	OPD Provinsi ;	SEKRETARIAT
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	24	23	185.000.000	185.000.000	230.000.000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	3	3.000.000	3.000.000	3.000.000			UPTD PPA
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	3	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Lokasi		Unit Kerja Penanggung jawab
							Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
							Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	2	254.200.000	254.200.000	222.570.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	1	445.800.000	445.800.000	393.811.000			UPTD PPA
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	8	116.000.000	116.000.000	129.105.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000			UPTD PPA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, agar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan prioritas jangka pendek serta instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja yang sudah dilakukan sampai dengan semester pertama tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perempuan dan Anak Tahun 2024, yang menjadi prioritas antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran akhir RPD Jawa Tengah tahun 2024-2026; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam RKPD Jawa Tengah tahun 2024 yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas".

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang perlu diatur antara lain:

1. Sekretariat, UPTD dan unit kerja internal berkomitmen mendukung pencapaian target indikator serta program dan kegiatan yang secara optimal;
2. Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur *pentahelix*, sehingga indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja tahun 2024 dapat tercapai;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjaga

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun (tahun 2024-2026), maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan RKPD Jawa Tengah tahun 2024;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Perubahan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan Perubahan Renja secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya optimal terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di Kabupaten/Kota serta mendorong terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bersinergi dengan Kampung Keluarga Berkualitas;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut, mulai dari pendataan, layanan aduan dengan online dan lain sebagainya;
5. Melakukan upaya optimal guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, pergerakan Safari KB dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta keberlanjutan Kampung KB yang mandiri dan berkelanjutan;

6. Mendorong implementasi dan pengintegrasian Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) 5 pilar dengan dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;
7. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan untuk mendukung penurunan stunting.